

Masyarakat Awam Jadi Sasaran Empuk Pinjol

Tanggal : Senin , 28 September 2020
Media : Rakyat Merdeka
Halaman : 11
Wartawan : dwi
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Bhima Yudhistira (*Ekonom Indef*)
Rubrik : Corporate & E-Commerce
Topik : Fintech Ilegal

Fintech Bodong Menjamur Di Era Pandemi

Masyarakat Awam Jadi Sasaran Empuk Pinjol

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menciduk ratusan usaha sektor keuangan yang tidak berizin alias bodong. Masyarakat pun diminta waspada, jangan termakan bujuk rayu oknum yang memanfaatkan situasi ekonomi yang sedang sulit.

MENURUT data, hingga September 2020 Satgas Waspada Investasi mendapati 208 entitas usaha ilegal. Jumlah ini terdiri dari 126 fintech *peer to peer lending* ilegal, serta 32 entitas investasi dan 50 perusahaan gadai tanpa izin.

Menurut Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finances (Indef) Bhima Yudhistira, banyaknya *fintech* dan

layanan keuangan ilegal menunjukkan literasi masyarakat yang masih minim.

"Modus yang terjadi, mereka menawarkan masyarakat yang belum paham," ucapnya kepada *Rakyat Merdeka*.

Menurut Bhima, *fintech* ini tumbuh seperti jamur. Ditutup satu tumbuh seribu. Salah satu yang menjadi daya tarik masyarakat yakni dalam bentuk pin-

jaman *online* (pinjol) yang cepat cair atau kurang dari 24 jam.

"Membuat aplikasi baru kan gampang. Kalau *fintech* ilegalnya diblokir, mereka bisa buat lagi aplikasi yang sama," tuturnya.

Tak lupa Bhima mengkritisi pencegahan *fintech* ilegal yang dinilai lambat, karena hanya mengandalkan aduan dari masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Luban Tobing meminta masyarakat mewaspada pinjaman dana dari *fintech* ilegal, serta tawaran investasi dari entitas yang tidak memiliki izin.

"*Fintech lending* dan tawaran

investasi ilegal ini hanya bikin rugi dan bukanlah solusi bagi masyarakat," tegas Tongam dalam keterangannya di akhir pekan, kemarin.

Tongam memperingatkan, pinjaman dari *fintech lending* ilegal selalu mengenakan bunga yang tinggi dan jangka waktu pinjaman pendek. Serta meminta semua akses data kontak di telepon genggam, yang digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan.

Menurut dia, semua temuan tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk diblokir aksesnya

di laman internet dan di aplikasi jaringan seluler.

"Satgas juga sudah menyampaikan laporan informasi identitas *fintech lending* ilegal ini kepada Bareskrim Polri, untuk proses penegakan hukum," terangnya.

Adapun total *fintech* ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi untuk ditutup sejak 2018 hingga September 2020, mencapai 2.840 entitas.

"Banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin. Sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang berizin," pungkas Tongam. ■ DWI